



This is an open access article under
CC-BY-SA license

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA TANGERANG SELATAN MELALUI PROGRAM TANGSEL YOUTH PLANNER

Muhammad Nurman Novian, Sari Viciawati Machdum
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
Email: nurmannovian@gmail.com

Abstract. *Participatory development has become one of the main keys in development in accordance with what the community wants and needs. Community in participatory development is also a major highlight in the context of success in development. In participatory development in the City of South Tangerang, it is organized by the Tangsel Youth Planner (TYP) Program, which is the result of a collaboration between the South Tangerang City Development Planning Agency and the local community, namely the Tangsel Creative Foundation, which contains South Tangerang youth or local millennials. In previous research, it was said that the barrier to community participation was due to the lack of participation forums such as the Tangsel Youth Planner Program. From the results of this study it was found that it is very important for local community participation in development such as the Tangsel Youth Planner program. It is also known that the Tangsel Youth Planner program has the characteristics of an interventionist social development and uses a social development approach by the government.*

Keyword: *Participatory Development; Youth; Tangsel Youh Planner.*

Abstrak. Pembangunan partisipatif sudah menjadi salah satu kunci utama dalam pembangunan yang sesuai dengan apa yang di kehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat dalam pembangunan partisipatif juga menjadi sorotan utama dalam konteks keberhasilan dalam pembangunan. Dalam pembangunan partisipatif di Kota Tangerang Selatan di wadahi oleh Program Tangsel Youth Planner (TYP) yang merupakan hasil kerjasama Bappeda Kota Tangerang Selatan dengan Komunitas Lokal yaitu Tangsel Creative Foundation, berisi anak-anak muda Tangerang Selatan atau milenial lokal. Pada penelitian sebelumnya dikatakan bahwa hambatan partisipasi masyarakat dikarenakan minimnya wadah partisipasi seperti Program Tangsel Youth Planner. Dari hasil penelitian ini didapati bahwa sangatlah penting wadah partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan seperti adanya program Tangsel Youth Planner. Serta diketahui bahwa program Tangsel Youth Planner mempunyai karakteristik pembangunan sosial yang bersifat intervensionis, serta menggunakan pendekatan pembangunan sosial oleh pemerintah.

Kata Kunci: Pembangunan Partisipatif; Pemuda; Tangsel Youh Planner.



Open Journal Systems

[Read Online](#)

[PDF Reader](#)

PENDAHULUAN

Konsep demokratisasi dan desentralisasi dalam pembangunan yang berskala Nasional telah berdampak baik dalam mengembangkan kesadaran yang luas betapa pentingnya peran atau andil dari masyarakat, dalam suatu proses dan program pembangunan yang ada secara menyeluruh terutama dari Pemerintah. Adanya konsep partisipasi hadir sebagai konsep yang banyak menjadi topik perbincangan ketika membahas tema pembangunan. Namun daripada itu, vitalnya partisipasi dan pelibatan masyarakat nyatanya masih bisa dikategorikan belum secara holistik dapat dilakukan oleh stakeholder. Bisa dari pemerintah, swasta, komunitas ataupun oleh masyarakat khususnya pemuda atau masyarakat lokal dimana dirinya tinggal yang kemudian mampu untuk mengendalikan arah kebijakan pengembangan (Singgalen & Kudubun, 2017).

Pembangunan partisipatif juga sangatlah perlu dan sangat penting sekali dalam upaya kesejahteraan sosial masyarakat (Henry, 2014). Pemerintah khususnya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bidang Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan (EKOSOSMAS) sudah selayaknya menjadi pelopor dalam merangkul semua elemen dalam pembangunan, sesuai dengan rancangan pembangunan yang ada di dalam program kategori prioritas di Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021. Salah satunya adalah bagaimana sumber daya manusia bisa berkembang (Mastuti & Saleh, 2018).

Apalagi masyarakat lokal yang sangat mengetahui betul apa yang dibutuhkan dalam pembangunan di lokalitasnya atau tempat dimana dirinya tinggal. Tidak hanya berhenti disitu, masyarakat lokal juga akan lebih mengetahui potensi, peluang, hambatan, sumbatan serta sumber pendukung dalam pembangunan sehingga niat baik dari Pemerintah melalui BAPPEDA untuk melakukan pembangunan bisa berjalan dengan baik serta selaras dengan

pembangunan apa yang diinginkan oleh masyarakat lokal. Pelibatan masyarakat terutama masyarakat lokal sendiri merupakan suatu bentuk pendekatan yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah agar memberikan manfaat yang lebih besar (Sidiq & Resnawaty, 2017).

Upaya dalam melibatkan masyarakat lokal pada pembangunan juga berimplikasi pada tidak terjadinya distorsi dalam pembangunan, upaya ini bisa dilakukan oleh BAPPEDA sebagai lembaga Pemerintahan dengan menggandeng sumber yang ada di dalam masyarakat. Juga memiliki andil dalam pengambilan keputusan lebih dalam pembangunan (Rappang, 2017). Salah satu sumber yang sangat kuat adalah anak muda atau generasi milenial yang ada di masyarakat lokal atau kita bisa menyebutnya masyarakat lokal dan partisipasi aktifnya sangat efektif dalam mendorong pembangunan (Ambo-Rappe et al., 2020). BAPPEDA bisa memanfaatkan anak muda atau masyarakat lokal ini yang mana di beberapa daerah tidak sedikit yang justru menjadi isu strategis atau menjadi permasalahan tersendiri. Upaya pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan ini juga sekaligus menjadi satu solusi untuk mengentaskan pemuda atau masyarakat lokal ini dari pembahasan isu strategis dengan mewadahi segala bentuk energi dan mengarahkannya kedalam hal yang positif. Wadah tersebut bisa berupa program yang dalam perjalanannya mendorong dan menciptakan pemberdayaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat lokal (Matdoan, 2015).

Masyarakat lokal dengan segudang potensinya sangat bisa bermitra dengan apik jika partisipasinya bisa diberikan wadah yang tentunya bisa mengeksplor segala apa yang mereka miliki dan untuk meningkatkan partisipasinya perlu adanya wadah aspirasi (Amalia, 2015). Oleh karenanya, sangat amat penting bagaimana masyarakat lokal yang mempunyai segudang potensi dengan

berbagai latar belakang yang mumpuni bisa dilibatkan pada praktik pembangunan yang berkesinambungan serta terfokus pada masyarakat khususnya masyarakat lokal baik itu di tingkat lokal maupun nasional, partisipasi serta pemberdayaan adalah tergolong masalah yang amat vital.

Pelibatan masyarakat lokal inilah yang kemudian sangat ditekankan agar semua pihak bisa turut serta utamanya dalam pembangunan (Affandi, 2016). Peran aktif masyarakat lokal secara langsung adalah suatu prinsip yang mendasar dalam suatu proses partisipasi dan pemberdayaan. Pembangunan tidak akan bisa terlaksana dengan baik jikalau masyarakat lokal bersikap pasif atau tidak turut serta sedini mungkin, lalu proses hingga pada hasil dari proses pembangunan tersebut. Pelibatan masyarakat lokal juga sering membantu dalam proses upaya kesejahteraan sosial dengan tokoh yang turut hadir membantu atau proaktif (Suhendi, 2013).

Adanya peran aktif masyarakat bisa menjadi suatu harapan positif bagi suatu proses yang tentunya baik dan benar. Seiring tumbuh suburnya rasa percaya masyarakat lokal terhadap Pemerintah yang diwadahi oleh BAPPEDA dan berimplikasi pada rasa percaya kepada Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, partisipasi masyarakat lokal sangatlah mungkin akan dapat terwujud tidak hanya secara parsial. Karena jika masyarakat lokal mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama, rasa percaya diri masyarakat lokal akan berangsur tumbuh dengan pesatnya. Juga berlaku sebaliknya yaitu akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis seperti timbulnya perpecahan atas dasar kecemburuan, karena perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat lokal akibat pelayanan yang membedakan dari Pemerintah, dan lebih parahnya bisa menimbulkan konflik sosial diantara masyarakat lokal itu sendiri. Partisipasi masyarakat lokal juga termasuk dalam salah satu hal yang vital dari segi

pembangunan berkelanjutan (Siahaya et al., 2016).

Masyarakat lokal sangat diharapkan partisipasinya agar mampu untuk bisa secara kritis menilai bagaimana lingkungan sosial dan ekonomi secara mandiri, menganalisis perbaikan atas bidang yang memang sangat perlu untuk diperbaiki. Selain masyarakat lokal diharapkan bisa berpartisipasi dalam menilai lingkungan sosial ekonomi secara mandiri dan menemukan perbaikannya, masyarakat lokal sangat diharapkan partisipasinya agar mampu merumuskan apa visi di kemudian hari yang ingin mereka capai. Lalu masyarakat lokal sangat diharapkan partisipasinya agar mampu terlibat aktif merencanakan rancangan ke depan secara mandiri dan efisien tanpa adanya ketergantungan kepada ahli atau suatu kelompok yang sedang berkuasa atau mendominasi. Sedangkan menurut beberapa ahli, suatu rangkaian pembangunan yang tertuju pada masyarakat barulah dikategorikan sebagai pembangunan yang partisipatif (Henry, 2014).

Masyarakat lokal juga sangat diharapkan partisipasinya agar mampu mengumpulkan dan memaksimalkan sumber daya yang terkandung di dalam masyarakat serta pada lingkup anggotanya agar tujuan bersama bisa teralisasi seperti apa yang sebelumnya sudah direncanakan. Diharapkan juga akan terbangunnya hubungan erat serta integratif sesama masyarakat khususnya antar masyarakat lokal. Terlebih menguatnya modal sosial berupa rasa memiliki agar dalam pemeliharaan dan operasionalnya bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya (Asnudin, 2010).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengungkapkan serta mendeskripsikan hasil temuan yang berupa kata-kata, agar dapat mengungkap bagaimana faktor penghambat

pembangunan partisipatif di Kota Tangerang Selatan melalui Program Tangsel Youth Planner. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi dari penelitian baik jurnal, artikel, buku, website dan lain sebagainya yang menjadi sarana pendukung dalam pengumpulan data yang telah ada sebelumnya, sehingga bisa diketahui secara jelas bagaimana perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini serta bagaimana penelitian ini menjawab penelitian sebelumnya yang membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mulai dari adanya hambatan serta sumbatan dalam pelaksanaan partisipasi dan kendala lainnya yang kemudian sebagian besar memerlukan wadah partisipasi seperti program Tangsel Youth Planner (TYP).

Program Tangsel Youth Planner inilah yang kemudian menjadi suatu inovasi dari Komunitas Tangsel Creative Foundation dengan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan agar menjadi wadah guna partisipasi masyarakat utamanya para pemuda dalam pembangunan lokalitasnya sendiri. Singkatnya, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata dan angka serta menyajikan profil, klarifikasi jenis, atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana dan bagaimana (Djamba & Neuman, 2002).

HASIL DAN DISKUSI

Pembangunan partisipatif yang diusung sudah pasti sangatlah disambut baik oleh masyarakat terutama masyarakat lokal namun masih ada saja kasus yang menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Anak Agung Gede Raka & Yasa, 2020). Selain itu juga di penelitian yang lain menunjukkan bagaimana terdapat masyarakat tidak bisa terlibat saat proses perencanaan pembangunan serta tidak tersedianya wadah (Kristina & Tyas, 2018). Namun selain wadah partisipasi yang sangat amat dirasakan oleh

masyarakat ketiadaannya, setidaknya ada juga pembaharuan dalam upaya partisipatif agar akuntabilitasnya bisa dirasakan bersama (Handoyo et al., 2014) dibalik perundangan yang dibuat oleh pemerintah juga nampaknya masih terseok dalam implementasinya (Firmansyah et al., 2014).

Serta dari penelitian sebelumnya mengenai partisipasi masyarakat terdapat hambatan-hambatan seperti penelitian dari (Harfis, 2019). dari jurnal tersebut terlihat faktor wadah partisipasi yang minim mengakibatkan terhambatnya partisipasi aktif dari masyarakat. Dan melihat dari penelitian sebelumnya mengenai pelaksanaan atau peningkatan partisipasi seperti penelitian dari (Affandi, 2016) menunjukkan bahwa terlaksananya partisipasi masyarakat khususnya pada partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan adalah adanya wadah partisipasi begitupun dengan penelitian (Sajuwitaningtyas, 2014).

Berdasarkan tahapan siklus pembangunan, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan harusnya juga terlibat pada semua titik pada siklus pembangunan tersebut. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui BAPPEDA tentunya sangat erat kaitannya dengan upaya kesejahteraan sosial masyarakat dimana pembangunan itu dilakukan, oleh karenanya Midgley mengkategorikan empat pendekatan dalam upaya kesejahteraan sosial. Yang pertama adalah filantropi sosial yang sarat kaitannya dengan kegiatan amal atau charity yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Yang kedua adalah pekerja sosial, pendekatan ini lebih terorganisir dari filantropi sosial karena melibatkan tenaga profesional untuk menangani masalah

sosial, yang ketiga adalah administrasi sosial yaitu lebih kepada upaya pemerintah untuk menciptakan program sosial dalam menangani masalah sosial yang salah satu produknya adalah Undang-Undang atau Kebijakan. Yang terakhir adalah pembangunan sosial yaitu proses perubahan sosial terencana dengan memadukan dinamika proses pembangunan ekonomi (Midgley, 1995).

Konsep pembangunan sosial sebagai kritik atas pembangunan yang berpusat pada ekonomi dan meninggalkan sejumlah permasalahan baru terutama permasalahan sosial diungkapkan oleh Midgley mempunyai perspektif alternatif dan disebutkan sebagai pengembangan (*developmental perspective*), perspektif ini ditawarkan dengan memperhatikan aspek positif melalui pendekatan statis maupun residual. Konsep atau pendekatan pembangunan sosial itu kemudian menjadi sebutan lain dari perspektif ini, lalu (Midgley, 1995) menjelaskan bahwa:

"a process of planned social change designed to promote the well-being of population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development." (Midgley, 1995)

Midgley dalam bukunya menjelaskan bahwa proses pembangunan sosial adalah didefinisikan dalam istilah konseptual karena memiliki tiga aspek. Pertama yang sudah ada sebelumnya kondisi sosial yang berusaha diubah oleh pembangunan sosial. Berikutnya, proses perubahan itu sendiri dan akhirnya keadaan akhir di mana tujuan pembangunan sosial tercapai. Lalu adanya proses perubahan seperti yang dipahami oleh para pendukung perkembangan sosial bersifat progresif. Para pendukung pembangunan sosial berpendapat bahwa kembali ke gagasan perbaikan sosial sangat dibutuhkan (Midgley, 1995).

Ke lima, proses perkembangan sosial bersifat intervensionis. Mereka percaya bahwa diperlukan upaya terorganisir untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. Mereka percaya bahwa manusia tidak terbawa arus peristiwa, tetapi bahwa mereka mampu mempengaruhi masa depan mereka sendiri. Proses perkembangan sosial oleh karena itu, diarahkan oleh manusia yang melaksanakan rencana khusus dan strategi untuk mendorong tujuan pembangunan sosial (Midgley, 1995).

Ke enam, tujuan pembangunan sosial dibina melalui berbagai strategi. Mereka didukung oleh berbagai keyakinan atau ideologi tentang bagaimana tujuan pembangunan sosial bisa dicapai dengan baik. 'Ideologi' ini secara historis telah ditentang satu sama lain, dan teori serta strategi yang mereka inspirasi adalah juga bertentangan satu sama lain. (Midgley, 1995).

Ke tujuh, pembangunan sosial berkaitan dengan kependudukan sebagai bagian utuh dan, oleh karena itu, bersifat inklusif atau universalistik. Seperti dulu disebutkan sebelumnya, pembangunan sosial berbeda dari filantropi dan pendekatan perawatan sosial yang tidak berfokus terutama pada yang membutuhkan individu. Sebaliknya, para pendukung pembangunan sosial menganjurkan adopsi fokus makro yang mengarahkan perhatian ke komunitas, wilayah dan masyarakat. Sedangkan pembangunan sosial sangat memperhatikan mereka yang terabaikan oleh pertumbuhan ekonomi atau tersisih dari pembangunan, kepeduliannya terhadap kelompok-kelompok ini terjadi dalam konteks intervensi universal yang lebih luas mempromosikan kesejahteraan semua. Aspek lain dari universalisme pembangunan sosial adalah fokus spasialnya. Dalam konteks universalismenya, Pembangunan sosial berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam pengaturan spasial tertentu seperti kawasan dalam kota,

komunitas pedesaan, kota, wilayah atau negara (Midgley, 1995).

Terakhir, tujuan pembangunan sosial adalah promosi sosial kesejahteraan. Kondisi sosial kesejahteraan dibina melalui berbagai mekanisme atau lembaga. Dengan intervensionisme, komitmen untuk maju, fokus makro, universalisme, integrasi kebijakan sosial dengan pertumbuhan ekonomi, fokus sosial-spasial dan eklektik, pendekatan pragmatis, pembangunan sosial adalah yang paling inklusif dari semua pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan sosial saat ini (Midgley, 1995).

Dari penjelasan Midgley diatas terlihat bahwa ada delapan karakteristik dalam pembangunan sosial mengatasi permasalahan sosial. Yang pertama adalah terkait dengan pembangunan ekonomi, yang kedua fokus interdisiplin, yang ketiga sebagai proses, yang keempat secara alami perubahannya bergerak maju, yang kelima bersifat intervensionis, yang keenam strateginya beragam, yang ketujuh populasi sebagai suatu kesatuan, yang kedelapan tujuannya untuk promosi atau memberikan dukungan agar terciptanya kesejahteraan sosial (Midgley, 1995).

Pada penelitian ini dengan melihat penjelasan Midgley diatas, karakteristik yang lebih cocok adalah karakteristik dalam pembangunan sosial nomor lima yaitu proses pembangunan sosial bersifat intervensionis, karena pada penelitian ini pembangunan sosial diterapkan oleh adanya intervensi dari BAPPEDA Tangsel dan kemudian melibatkan partisipasi masyarakat lokal karena diperlukan upaya yang terorganisir untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial melalui program Tangsel Youth Planner. Midgley menjelaskan secara rinci terkait konsep pembangunan sosial oleh Pemerintah pada buku *Social Development* halaman 125 bahwa pembangunan sosial paling baik dapat dipromosikan oleh pemerintah, badan khusus mereka, pembuat kebijakan, perencana dan administrator membentuk

dasar dari pendekatan statist untuk pembangunan sosial. Pada penelitian ini adalah BAPPEDA Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya Midgley melihat pada ideologi kolektivis, pendukung strategi statist percaya bahwa Negara mewujudkan kepentingan masyarakat sebagai bagian utuh dan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga. Para ahli statistik percaya bahwa Pemerintah dimiliki secara kolektif oleh warganya dan mewakili kepentingan mereka. Karena itu, Negara adalah yang tertinggi dimiliki secara kolektif. Namun, para ahli statistik mengakui bahwa Pemerintah tidak selalu bertindak cara-cara yang sebenarnya memajukan kesejahteraan rakyat. Mereka tidak secara naif tidak menyadari cara kekuasaan Negara telah digunakan di masa lalu (dan masih digunakan sampai sekarang) untuk menindas massa. Namun demikian, mereka percaya bahwa banyak Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warga mereka dan bahwa mereka mampu memobilisasi sumber daya untuk mencapainya tujuan ini. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menjamin sosial itu kebijakan pembangunan dilaksanakan, dan sosial dan ekonomi kebijakan diselaraskan (Midgley, 1995).

Pada akhirnya, menurut Midgley ada 3 strategi utama dalam upaya pembangunan sosial yaitu pendekatan pembangunan sosial oleh individu. Dengan penjelasan bahwa menurut pendukung Midgley intervensi khusus oleh pemerintah dan organisasi dibutuhkan guna mempromosikan pembangunan sosial dalam konteks ekonomi pasar. Keyakinan tersebut yang kemudian melekat pada pendekatan individualis untuk perkembangan sosial (Midgley, 1995).

Yang ke dua adalah pendekatan pembangunan sosial oleh masyarakat, dengan penjelasan bahwa menurut Midgley pembangunan sosial paling baik dapat dipromosikan oleh orang-orang itu sendiri. Bisa bekerja bersama dengan komunitas

lokal untuk pembangunan sosial. Mereka sangat perlu bekerja sama serta selaras tujuan baik itu visi maupun misinya. Dengan mereka melakukan cara ini, diharapkan mampu mengontrol lebih besar atas sumber daya dan urusan lokal. Serta dapat diberdayakan dalam promosi pembangunan di tingkat lokalitas mereka (Midgley, 1995).

Yang ke tiga adalah pendekatan pembangunan sosial oleh Pemerintah dengan penjelasan bahwa menurut Midgley pembangunan sosial paling baik dapat dipromosikan oleh pemerintah, badan-badan khusus mereka, pembuat kebijakan, perencana dan administrator membentuk dasar dari pendekatan statistik untuk pembangunan sosial. Oleh karena itu, negara adalah kolektif tertinggi. Namun, para ahli statistik mengakui bahwa pemerintah tidak selalu bertindak dengan cara yang, pada kenyataannya, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mereka bukannya tidak secara naif menyadari bagaimana kekuasaan negara telah digunakan di masa lalu dan masih digunakan sampai sekarang untuk menindas massa (Midgley, 1995).

Namun demikian, mereka yakin bahwa banyak pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dan bahwa mereka mampu mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan ini. Kemudian ada tinjauan terhadap strategi yang menekankan pada redistribusi sumber daya sebagai kebutuhan dasar pembangunan sosial. Berikut pertimbangan pendekatan kebutuhan dasar yang membebani pemerintah dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan sosial semua warga terpenuhi. Terakhir, pendekatan pembangunan berkelanjutan yang meminta pemerintah untuk mempromosikan kebijakan yang melindungi lingkungan dan melindungi kepentingan generasi mendatang (Midgley, 1995).

Pada penelitian ini dengan melihat penjelasan Midgley diatas, pendekatan yang akan digunakan atau yang cocok terhadap penelitian ini adalah pendekatan pembangunan

sosial oleh Pemerintah karena penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana upaya BAPPEDA Tangsel dalam pembangunan yang partisipatif oleh masyarakat lokal di Tangsel dengan memperdalamnya pada pendekatan pembangunan berkelanjutan yang meminta pemerintah untuk mempromosikan kebijakan yang melindungi lingkungan dan melindungi kepentingan generasi mendatang.

Pembangunan yang ada di Kota Tangerang Selatan dalam konteks ini melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bidang Bidang Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan (EKOSOSMAS) serta melihat Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 4 huruf d, yang membawahi Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat dan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan, sudah selayaknya menjadi pelopor dalam merangkul semua elemen dalam pembangunan (Bappeda, n.d.).

Dari enam isu strategis dalam pembangunan Kota Tangerang Selatan, melalui program Kota Tangerang Selatan Youth Planner mengakomodir keterlibatan masyarakat dengan fokus tema sarana dan prasarana wilayah yaitu lebih menekankan aspek pembangunan fisik di Kota Tangerang Selatan. Seperti contoh desain landmark Kota Tangerang Selatan, alun-alun Kota Tangerang Selatan dan pembangunan-pembangunan yang sifatnya fisik. Menariknya, isu strategis yang ingin dibahas dengan melibatkan masyarakat lokal muda yang termasuk isu strategis juga nomor dua yaitu tentang pertumbuhan penduduk. Pembangunan lokal di tangerang selatan melalui program Kota Tangerang Selatan Youth Planner secara tidak langsung mewadahi 3 isu utama dalam isu strategis dalam pembangunan di Kota Tangerang

Selatan dengan melibatkan masyarakat lokal yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Partisipasi masyarakat lokal di Tangerang Selatan khususnya generasi muda atau masyarakat lokal yang masuk kedalam bonus demografi terserap melalui program Kota Tangerang Selatan Youth Planner. Melalui program ini, bonus demografi yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan dimanfaatkan secara baik dalam keterlibatannya membangun lokalitasnya yang tentunya akan mempengaruhi kehidupan mereka sebagai masyarakat lokal di Tangerang Selatan, serta kemudian implikasinya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lokal di Tangerang Selatan karena partisipasi aktifnya dalam membangun lokalitasnya sendiri. Selain juga program Tangsel Youth Planner ini juga merupakan program hasil kerjasama antara Komunitas lokal yaitu Tangsel Creative Foundation dengan BAPPEDA Kota Tangerang Selatan dirasa sangatlah penting sekali.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini didapati bahwa sangatlah penting wadah partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan seperti adanya program Tangsel Youth Planner (TYP) agar meminimalisir adanya hambatan dalam upaya partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan partisipatif di Kota Tangerang Selatan di wadahi oleh Program Tangsel Youth Planner (TYP) yang merupakan hasil kerjasama Bappeda Kota Tangerang Selatan dengan Komunitas Lokal yaitu Tangsel Creative Foundation, berisi anak-anak muda Tangerang Selatan atau milenial lokal. Pada penelitian sebelumnya dikatakan bahwa hambatan partisipasi masyarakat dikarenakan minimnya wadah partisipasi seperti Program Tangsel Youth Planner. Serta diketahui bahwa program Tangsel Youth Planner (TYP) mempunyai karakteristik pembangunan sosial yang bersifat intervensionis, serta menggunakan pendekatan pembangunan sosial oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, O. (2016). *Tinjauan Antropologi Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kehutanan*. January 2002, 0-5.
- Amalia, T. R. (2015). *Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*. Kpm 200.
- Ambo-Rappe, R., Gatta, R., Mappangara, S., Ukkas, M., & Faizal, A. (2020). Role of the Millennial Generation in Conserving Mangrove and Cultural Heritage in Sanrobone, South Sulawesi. *Jurnal Penyuluhan*, 16(2), 213-223. <https://doi.org/10.25015/16202030038>
- Anak Agung Gede Raka, N. A., & Yasa, P. N. S. (2020). Jurnal Kajian Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 10(23), 95-118.
- Asnudin, A. (2010). Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur Perdesaan di Indonesia. *Jurnal SMARTek*, 8(3), 182-190.
- Bappeda. (n.d.). *No Title*. <https://Bappeda.Tangerangselatankota.go.id/>. <https://bappeda.tangerangselatankota.go.id/>
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Firmansyah, A., Effendi, C., Wahiyuddin, L. O., Ridhawati, S., & Apriliyanti, D. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 18(1), 66-78. <https://doi.org/10.22146/jkap.6877>
- Handoyo, Kastanya, A., Bone, I., Wibowo, L. R., Pelupessy, P. J., Rozari, I. De, & Ronsumbre, A. (2014). *Panduan pelibatan masyarakat lokal dalam Implementasi REDD+*.
- Harfis, H. (2019). Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam

- pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2), 30-37.
- Henry. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik, Volume 2*(Desember 2014), 118.
- Kristina, D., & Tyas, W. P. (2018). Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Permukiman Kampung Nelayan. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(1), 35. <https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.35-44>
- Mastuti, S., & Saleh, A. (2018). *Di Kota Tangerang Selatan*. 2(1), 25-36.
- Matdoan, U. (2015). Peranan Program Pnpm-Mandiri Pedesaan Dalam Mendorong Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *Jurnal Biology Science and Education*, 4(1), 74-82. <http://dx.doi.org/10.33477/bs.v4i1.531>
- Midgley. (1995). Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. <https://doi.org/10.4135/9781446221839>
- Rappang, S. (2017). *Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kelurahan kanyuara kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang*. 5(2).
- Sajuwitaningtyas, R. (2014). Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi pada Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan Kalianak Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 2. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp86a762dbdbfull.pdf>
- Siahaya, M. E., Salampessy, M. L., Febryano, I. G., Rositah, E., Silamon, R. F., & Ichsan, A. C. (2016). Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Konservasi Hutan Mangrove di Wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. *Jurnal Nusa Sylva*, 16(1), 12-17.
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 38. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14208>
- Singgalen, Y. A., & Kudubun, E. E. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata : Studi Kasus Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II di Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Cakrawala*, 6(2), 199-228.
- Suhendi, A. (2013). Peranan Tokoh Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Informasi*, 18(02), 105-116. <https://media.neliti.com/media/publications/52845-ID-peranan-tokoh-masyarakat-lokal-dalam-pem.pdf>